

LAUNCHING BAYAR PAJAK DENGAN QRIS Bantul Jadi Kabupaten Digital

BANTUL (KR) - Bank BPD DIY bersinergi dengan Pemkab Bantul menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TP2DD dengan tema 'Launching Bayar Pajak dengan QRIS'.

Program Bayar Pajak dengan QRIS (Pakde QRIS) Kabupaten Bantul tahun 2024 sebagai upaya dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah, dalam acara tersebut juga dilaksanakan pengundian hadiah atas pelunasan pembayaran PBB P2 tahun 2024.

Secara simbolis, Bayar Pakde QRIS ini diserahkan oleh Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih kepada Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad.

"Tujuan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul



KR-Istimewa

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, didampingi Dirut Bank BPD DIY, Santoso Rohmad dalam Launching Bayar Pajak dengan QRIS.

adalah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan dan memperluas kanal digital dengan menambah kanal QRIS dinamis untuk pembayaran pajak, meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berujung pada pening-

katan pelayanan kepada masyarakat," jelas Bupati.

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad, mengungkapkan elektronifikasi transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul maupun elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan tahun 2019.

(Roy)-d

'Gebyar Muhipa, Muhipa Baru' SMA Muh Pakem



KR-Istimewa

Bupati Sleman Kustini menghadiri 'Gebyar Muhipa, Muhipa Baru'.

SLEMAN (KR) - SMA Muhammadiyah Pakem sukses menggelar jalan sehat dengan tema 'Gebyar Muhipa, Muhipa Baru', Sabtu (14/9). Acara tersebut merupakan satu rangkaian untuk memulai langkah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kegiatan yang berlangsung meriah ini dihadiri Bupati

Sleman Kustini dan diharapkan menjadi langkah awal menuju SMA Muhammadiyah Pakem dengan semangat yang baru.

Plt Kepala SMA Muhammadiyah Pakem Kasyadi menjelaskan, sukses acara ini membawa harapan baru bagi sekolah. "Semangat guru dan karyawan SMA Muham-

madiyah Pakem membawa harapan baru, yakni sekolah SMA Muhammadiyah Pakem Lebih Unggul. Hal ini terlihat dari suksesnya acara jalan sehat. Mindset baru dan keyakinan kuat yang ada pada guru karyawan perlu dipertahankan agar layanan pendidikan semakin meningkat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada sekolah ini tinggi. Dan ini terlihat dari sukses PPDB TP 2025/2026 tahun depan," ujar Kasyadi.

Jalan sehat dengan rute 4 km dan dibanjiri berbagai doorprize tersebut berhasil menarik antusiasme warga masyarakat untuk turut serta, bahkan tercatat mencapai lebih dari 1.000 peserta.

(Has)-d

POLDA DIY GAGALKAN

Penangkapan Benur Melalui Jalur Laut

WONOSARI (KR) - Penangkapan benur (Anakan udang lobster) di Perairan laut selatan Kabupaten Gunungkidul digagalkan Subdit Gakkum Polairud Polda DIY.

Hal tersebut dilakukan sehari setelah polisi menangkap dua nelayan Pacitan Jawa Timur yang membawa benur dari perairan laut Kulonprogo untuk dibawa ke Pacitan melalui jalur laut.

"Kedua nelayan tersebut membawa 215 ekor benur untuk dibawa ke Pacitan," kata kasubdit Gakkum Polairud Polda DIY AKBP Rachmadewanto.

Kedua nelayan tersebut berinisial DA (40) dan GA

(37) warga Pacitan, Jawa Timur dan sudah dimintai keterangan. Terkait kasus ini polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Sesuai aturan pihaknya tidak melakukan penahanan keduanya akan dikenai sanksi administrasi. "Terkait sanksinya administrasi sehingga tidak bisa ditahan selama diproses dikenai Wajib apel," ujarnya.

Sehari sebelumnya pihaknya sempat mendapati

dua nelayan dan satu perahu di Pantai Gesing, Gunungkidul. Awalnya kedua nelayan tersebut melaut mencari ikan dan benur di Pantai Klayar, Pacitan. Karena hanya mendapatkan sedikit tangkapan ikan dan benur, mereka berdua pergi ke Pantai Gesing Kapanewon Panggang, Gunungkidul usai mendapatkan informasi dari sesama nelayan jika terdapat benur di pantai di DIY.

Sampai di selatan Pantai Gesing, perahu yang digunakan dua nelayan asal Pacitan itu kehabisan bahan bakar dan berlabuh. Akhirnya petugas

Polairud DIY mendatangi keduanya.

Saat dua nelayan itu diinterogasi oleh polisi, Rahmad menerangkan, pihaknya tidak menemukan barang bukti benur. Akhirnya kedua nelayan itu pun kembali pulang.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul, Rujimanto, mengeluhkan banyaknya nelayan dari luar DIY yang menangkap benur di wilayah Gunungkidul. Disebutkan bahwa jumlah nelayan tersebut mencapai 200-300 perahu.

(Bmp)

YIA Tambah 3 Rute Baru Domestik

TEMON (KR) - Manajemen Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) kembali menambah tiga rute baru penerbangan langsung. Sebelumnya rute baru Yogyakarta - Berau dibuka secara resmi pada 29 Agustus 2024 lalu.

General Manager (GM) YIA, Rully Artha mengatakan, tiga rute baru penerbangan langsung tersebut Padang, Jambi dan Pangkal Pinang dengan menggunakan maskapai Super Air Jet. Rute Yogyakarta - Padang, Yogyakarta - Jambi dan Yogyakarta - Pangkal Pinang (pergi pulang/PP) dipersiapkan dengan menggunakan pesawat jenis Airbus A320-200 (180 kursi kelas ekonomi).

Kedatangan pesawat perdana IU-377 disambut dengan tradisi water



KR-Asrul Sani

Kedatangan perdana pesawat Super Air Jet IU-377 disambut dengan tradisi water salute.

salute. Selain itu para penumpang pesawat mendapatkan sambutan tari-kain khas daerah dan pemberian cinderamata.

Rully Artha menyambut baik pembukaan rute baru tersebut. Pihaknya juga optimis minat perjalanan masyarakat dapat meningkat dengan adanya tiga rute baru penerbangan langsung melalui YIA.

iSaat ini YIA memiliki 17 rute penerbangan domestik dan juga dilengkapi dua rute penerbangan internasional yaitu ke Singapura dan Malaysia," jelasnya.

"Kami percaya rute baru Padang, Jambi dan Pangkal Pinang akan turut menyumbang pertumbuhan wisatawan dan pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya di DIY dan sekitarnya serta

wilayah Sumatera," jelasnya.

Dirut Super Air Jet, Ari Azhari menjelaskan, penumpang yang menggunakan rute ini tidak hanya mendapat pengalaman perjalanan yang lebih menarik tapi juga mendukung pengembangan perekonomian lokal di Sumatera, DIY hingga Jawa Tengah.

"Dengan semakin banyaknya akses transportasi, penumpang pun turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi setempat," jelas Ari Azhari.

Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi mengucapkan *sugeng rawuh*, selamat datang, selamat menikmati DIY terutama Kabupaten Kulonprogo.

(Rul)

JANUARI - JUNI SUDAH 27 KALI DIGELAR

Satpol PP Bantul Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Melaksanakan Penegakan Perda

BANTUL (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penegakan Peraturan Daerah, dengan harapan agar peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul, R Jati Bayubroto SH MHum memaparkan, kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2024 sebanyak 27 kali, dengan rincian, Januari 6 kali, Februari 6 kali, Maret 2 kali, April 4 kali, Mei 6 kali dan Juni 3 kali.

Ruang lingkup materi, meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pe-

nyelenggaraan Perumahan.

Maksud kegiatan ini agar masyarakat dapat mengetahui, memahami dan mengimplementasikan Peraturan Daerah. Dan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah yang berlaku; memberikan penjelasan tentang tatacara penegakan Peraturan Daerah, memberikan penjelasan tentang dampak yang ditimbulkan jika Peraturan Daerah tidak dipedomani dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Serta meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah. Untuk nara sumber menghadirkan dari DPRD Kabupaten Bantul, Polres Bantul, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Bantul dan Akademi.

Peserta yang ikut dalam kegiatan ini, masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bantul dengan jumlah 40-60 orang setiap kegiatan. Dalam kegiatan tersebut ternyata Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, lebih banyak menarik perhatian peserta, karena berkaitan dengan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Peserta menyadari bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba bisa mempengaruhi hubungan sosial generasi muda.



Pengkatan Kapasitas dalam rangka penegakan Perda No 2 Th 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Obat-obatan tersebut menyebabkan perilaku ketidakstabilan emosional dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman dan masyarakat sekitar. Kepala Satpol PP Bantul mengatakan, dasar hukum kegiatan ini mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerimaan dan Belanja Daerah. Sementara tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Pemerintah.

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. (Jdm)



Peningkatan Kapasitas dalam rangka penegakan Perda No 20 Th 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame



Peningkatan kapasitas dalam rangka penegakan Perda No 4 Th 2024 Tentang Minuman Beralkohol



Peningkatan Kapasitas dalam rangka penegakan Perda No 5 Th 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran